

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAKSI.....	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
1. Kegunaan Teoritis	17
2. Kegunaan Praktis.....	17
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Metode Penelitian	30
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Metode Pendekatan.....	31
3. Tahapan Penelitian.....	32

4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Alat Pengumpul Data.....	34
6. AnalisisData	35
7. Lokasi Penelitian.....	36
8. Jadwal Penelitian	35

**BAB II DEMOKRATISASI DALAM IMPLEMENTASI PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN MEKANISME CALON KEPALA
DAERAH**

A. Sistem Demokrasi Deliberatif.....	37
1. Pengertian Demokrasi Deliberatif	37
2. Ciri – ciri Pemerintahan Demokrasi	47
3. Perspektif Demokrasi Deliberatif Dalam Pemilihan Umum	49
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah	34
1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah	52
2. Relasi pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Otonomi Daerah	55
3. Tujuan dan Fungsi Pemelihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung.....	58
C. Peran dan Fungsi Partai Politik.....	61
1. Pengertian Partai Politik	61
2. Syarat – Syarat Pembentukan Partai Politik	63
3. Fungsi Partai Politik.....	66
D. Mekanisme Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	71

1. Pengertian Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	71
2. Calon Perseorangan Dalam Perspektif Teori Demokrasi	78
3. Calon Perseorangan Dalam Teori HAM dan Teori Keadilan Sosial	80

BAB III PERBANDINGAN MEKANISME CALON PERSEORANGAN DENGAN CALON YANG DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

A. Mekanisme Calon Kepala Daerah	92
B. Perbandingan Calon perseorangan dengan Calon Partai Politik dalam Pilkada	110
C. Syarat Calon Perseorangan dan Partai Politik di Korea Selatan dan Amerika Partai	132

BAB IV CALON PERSEORANGAN DALAM SISTEM DEMOKRASI DELIBERATIF DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO 5/PUU-V/2007 jo PUTUSAN MK NO 60/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Fungsi calon perseorangan dalam sistem demokrasi deliberatif.....	147
B. Ketentuan pengaturan calon perseorangan pasca putusan mk no 5/puu-v/2007 jo putusan mk no 60/puu-xii/2015 Sanksi	173
C. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap calon perseorangan	199

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	207
B. Saran	217

DAFTAR PUSTAKA	xv
-----------------------------	-----------